

A. Informasi yang dikecualikan

adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengecualian informasi harus didasarkan pada **pengujian konsekuensi**.

➤ **Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :**

1. Sebelum adanya permohonan informasi publik.
2. Pada saat adanya permohonan informasi publik.
3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik.

➤ **Informasi publik yang dikecualikan paling sedikit memuat :**

- Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan
- Identitas pejabat PPID yang menetapkan
- Badan publik
- Jangka waktu pengecualian
- Alasan pengecualian
- Tempat dan tanggal pengecualian

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

INFORMASI SECARA BERKALA						
No	Uraian Informasi	Dasar Hukum	Bidang	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Infomasi di Buka	Manfaat Informasi bila di Tutup
1	Surat surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR) dan Rahasia R dan Konfidensial	Permen PAN dan reformasi birokrasi No. 80 Tahun 2012 tentang pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah	Inspektorat	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat kebijakan pimpinan	Menjaga kerahasiaan data pemerintahan
2	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 ttg Hak Asasi - SE Menpan 08/M.PAN.RB/06/2012 ttg Sistem Penanganan Pengaduan (WBS)	Inspektorat/ Satpol PP	Tidak terbatas	Terjadi konflik dalam masyarakat	Keamanan pelapor dilindungi
3	a. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Khusus	- PP Nomor 79 Tahun 2005 ttg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan J	Inspektorat	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak yang berwenang	Menimbulkan stigmasi yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam LTP dan LHP dapat lebih efektif dan kondisi untuk adanya perhatian sistem tata kelola
4	Hukuman disiplin pegawai	PP No. 53 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil	Inspektorat	Tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai


Inspektur Kota Madiun
Drs. Gaguk Hariyono
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670720 198809 1 001